

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN- INDONESIA

Pada Ujian Akhir Mata Diklat Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang
Program Sarjana S-1 Terpadu Berbasis SE BANGKIT No
110209000000000000000000 tanggal 20 Oktober 2021, dengan ini
menyatakan bahwa

NAMA RICKI KAPUTRA RAJAGUKGUK
NPM 222311031
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif sebagai mahasiswa
Program Sarjana S-1 pada Hari Kamis, 04 April 2024 dengan nilai LULUS

Pada Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Hanay Ningsih, S.E., M.Si	1
2. Sekretaris	Melita Lator Parha, S.E., M.Si	2
3. Penguji Utama	Dr. Jumar Sihotang, M.Si	3
4. Anggota Penguji	Maria Lora Parha, S.P., M.Si	4
5. Pembaca	Iris F. Parha, S.E., M.Si	5

Dekan



(Dr. F. Hamorangin Sitanggang, S.E., M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi membutuhkan modal dasar sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Modal dasar pembangunan dapat berupa kekayaan alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Kesejahteraan umum adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menggunakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan kemiskinan di Indonesia. Menurut Mankiw (2006:154) “Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah berat. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebab dan membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengangguran Terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja.

Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin menurun tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Dalam artinya, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Annur (World Bank 2004: 411) bahwa, “salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tingkat kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang

dapat diterima”. Pengangguran juga masalah utama yang dihadapi negara berkembang untuk menjadi negara yang maju, tidak heran jika negara-negara berkembang terus berlomba untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di tiap-tiap daerahnya. Namun beberapa faktor memungkinkan untuk terjadinya fenomena dari pengangguran terbuka di tiap daerah seperti di kota-kota besar.

Menurut Sukirno (2006: 90) bahwa:

Pertambahan jumlah pengangguran di daerah pedesaan, pertambahan penduduk dan tenaga kerja yang semakin cepat dan besar disektor pertanian menimbulkan masalah perpindahan penduduk yang sangat berlebihan yang diartikan sebagai Migrasi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan Pengangguran Terbuka di tiap-tiap daerah yang sedang terjadi Migrasi.

Sebuah daerah yang terletak di negara Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 28 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatra Utara (7.160.000 Ha) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatra Utara.

Kabupaten ini berada pada ketinggian rata-rata 700 s.d. 1.250 m di atas permukaan laut. Jumlah penduduknya akhir tahun 2021 adalah sebanyak 318.616 jiwa, pendapatan perekonomian Kabupaten Dairi adalah dari sektor pertanian dan merupakan salah satu penghasil padi di provinsi Sumatera Utara, ”padi pada tahun 2022 sebesar 91 818 ton mengalami peningkatan sebesar 26,43 persen atau menjadi 116 086 ton, sementara luas panen untuk tahun 2022 sebesar 18021 ha dan untuk tahun 2023 seluas 22.323 ha” (Dinas Kominfo Dairi 2023).

Oleh karena itu produktifitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui empat pilar yang disebut “*Grand Strategy*”, yaitu:

1. perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh

kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2. pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Menurut Arfiani(2020: 6) bahwa:

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam perekonomian di setiap daerah maupun negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks, sehingga berbagai upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan harus diimplementasikan secara baik dan benar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah”.

Tabel 1 Perkembangan PDRB, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan Di kabupaten Dairi Tahun 2011-2021

Tahun	PDRB (Dalam Milyar Rupiah)	Pengangguran (Orang)	Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan (Dalam Ribuan Orang)
2011	4.687,10	3.325	66,62	25,87
2012	5.133,02	2.291	66,95	25,49
2013	5.711,56	2.934	67,15	24,00
2014	6.268,08	2.266	67,91	23,35
2015	6.823,16	1.930	69,00	25,33
2016	7.483,07	2.139	69,61	24,94
2017	7.980,47	2.237	70,36	24,98
2018	8.560,78	2.725	70,89	23,19
2019	9.166,42	2.539	71,42	21,86
2020	9.317,91	2.390	71,57	22,93
2021	9.710,80	2.506	71,84	23,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2021

Dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi dari tahun 2011-2021 cenderung menurun tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014, kemiskinan tersebut terjadi karena pada tahun 2014 Kabupaten Dairi mengalami penurunan tingkat produktivitas tanaman, penurunan tersebut terjadi karena kerusakan hasil panen dengan pemakaian pupuk terkena dengan hama tanaman akibat cuaca buruk, cuaca buruk mengakibatkan penurunan dari hasil masyarakat daerah tersebut sehingga barang atau hasil panen yang dijual sedikit dan pendapatan masyarakat desa tersebut berkurang dan menimbulkan tingkat kemiskinan tersebut di tahun 2014. Dan pada tahun 2020 -2021 kembali mengalami peningkatan dikarenakan COVID-19 yang mengharuskan masyarakat harus di rumah, Dalam pandangan Makro sendiri dapat di uraikan bahwa, semakin besar sumber daya dari pemerintah, keadaan keuangan pun juga akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

(DAU) dan Investasi Dalam Negeri (PMDN)”. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain semakin besar pendapatan dalam APBD, maka seharusnya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan. Hal ini karena lebih banyak dana yang dimiliki untuk membangun daerahnya dan akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sehingga mampu menekan banyaknya jumlah pengangguran di tiap-tiap daerah.

sedangkan pendapatan rata rata masyarakat Kabupaten Dairi dari bidang pertanian. Dalam pandangan makro sendiri dapat diuraikan bahwa, semakin besar sumber daya dari pemerintah, keadaan keuangan pun juga akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU) dan Investasi Dalam Negeri (PMDN)”. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain semakin besar pendapatan dalam APBD, maka seharusnya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan. Hal ini karena lebih banyak dana yang dimiliki untuk membangun daerahnya dan akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sehingga mampu menekan banyaknya jumlah Pengangguran di tiap-tiap daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2011-2021?

2. Bagaimanakah pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2011-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2011-2021?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagaimana pengaruh PDRB, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak swasta dalam melakukan suatu kebijakan.
3. Sebagai bahan studi dan acuan literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan HKBP Nommensen Medan.

4. Bagi masyarakat umum penelitian ini masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah makro ekonomi yang memberikan pengaruh kepada keberlangsungan hidup manusia secara langsung, pengangguran merupakan topik yang kerap didiskusikan pada debat politik oleh para pejabat yang melakukan kajian bahwasanya kebijakan yang ditawarkan dapat menjadi solusi dari hadirnya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Mankiw (2006: 176) bahwa :

Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang percuma. Pengangguran memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya. Pencari kerja yang cocok dengan keterampilannya akan senang saat pencarian pekerjaan mereka sesuai keinginannya.

Menurut Tutupoho (2019: 71) “Pengangguran disebabkan oleh cepatnya perubahan angkatan kerja, yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja”.

Dengan itu masalah pengangguran mungkin tidak dapat dihindari dari beberapa indikator tersebut, hal ini yang menjadikan pengangguran menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang.

Menurut Priyono & Chandra (2016: 6) bahwa, “di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi tidak semua penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia anak”.

Itu sebabnya masalah pengangguran yang kita hadapi setiap tahun semakin parah. Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Indikator Kemiskinan

Pandangan mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat beragam antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan tidak makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tempat dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan). Kebutuhan makan digunakan ukuran/standar 2100 kalori per hari. Ekuivalensinya menurut BPS (2018) sama dengan pendapatan sekitar Rp 400.995,00 perbulan untuk warga perkotaan dan pendapatan sebesar Rp 370.910,00 perbulan untuk warga pedesaan. Sedangkan menurut Bank Dunia (2016) menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan adalah USD \$2 per orang per hari untuk warga perkotaan dan US\$ 1 per hari bagi warga pedesaan.

1. Faktor penyebab terjadinya Pengangguran:

Beberapa faktor penyebab pengangguran menurut Franita (2016:89) yaitu,

a. Jumlah lapangan pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.

b. Kurangnya keahlian

Pencari kerja tidak memiliki keahlian. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

c. Kurangnya informasi

Dimana pencari kerja tidak memiliki cara/akses untuk mencari tahu tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.

d. Kurangnya meratanya lapangan pekerjaan

Kurang pemerataan lapangan kerja di seluruh kota dan sedikitnya lapangan kerja di tiap-tiap wilayah.

e. Kurang maksimalnya peran pemerintah

Pemerintah masih minim melakukan hal dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian para pekerja.

f. Budaya malas

Budaya malas yang masih banyak menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dan malas dalam mencari peluang kerja.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah, sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai plus bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembagawasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok.

e. Ekspor netto.

Pada awalnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan suatu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Regional Bruto perkapita daerah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan daerah tersebut sangat baik karena Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang memaparkan gambaran angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan kemiskinan.

Karena pada dasarnya salah satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah sumbangan pendapatan yang di uraikan pada data Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) untuk setiap wilayah tertentu.

Jumlah total PDRB per kapita suatu wilayah akan dibagi dengan jumlah total penduduk di wilayah tersebut, data hasil nya inilah yang dinyatakan sebagai PDRB per kapita. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gambaran dari jumlah akumulasi pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah disajikan dalam data PDRB per kapita, uraian yang didapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Walaupun begitu, sumbangan yang dihasilkan dari besaran PDRB per kapita masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi lainnya dari daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB per kapita bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu

Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Ada hubungan sangat erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi membawa dampak yang tidak baik bagi terciptanya dan membekakannya jumlah penduduk miskin yang ada sehingga menurunkan indeks kesejahteraan rakyat.

Dampak yang timbul oleh Pengangguran:

Adapun beberapa dampak yang timbul dari pengangguran Menurut Franita (2016: 90) yaitu:

a. Ditinjau dari segi ekonomi

Pengangguran meningkatkan angka kemiskinan. Karena banyaknya pengangguran dampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, meski biaya hidup terus berlanjut. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

b. Ditinjau dari segi sosial

Tingginya pengangguran yang diakibatkannya meningkatkan angka kemiskinan dan jumlah pengemis, gelandangan, dan pengamen jalanan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan karena pekerjaan sulit ditemukan dan banyak orang melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dll.

c. Ditinjau dari segi mental

Banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri seseorang, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi para pencari kerja.

d. Ditinjau dari segi politik

Akan banyak demonstrasi yang terjadi, yang membuat dunia politik menjadi tidak stabil akibat banyaknya demonstrasi dari para serikat pekerja karena maraknya pengangguran yang terjadi.

e. Ditinjau dari segi keamanan

Banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti pencurian, perampokan, penjualan narkoba dan penipuan.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pengangguran menurut Badan Pusat Statistika 2021 adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga,

siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis Pengangguran

Macam-macam pengangguran dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

1. Pengangguran tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

2. Pengangguran musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

3. Setengah menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk golongan setengah menganggur.

Berdasarkan klasifikasi, pengangguran dapat dibedakan menjadi jenis-jenis pengangguran.

Menurut Sukirno (2016: 328), jenis pengangguran adalah:

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Normal atau Fraksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh dan pengangguran itu disebut sebagai pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para

penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur, mereka inilah yang digolongkan sebagai penganggur normal.

Contoh dari pengangguran normal dan friksional: seorang guru honorer yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke lembaga pendidikan lain agar mendapatkan gaji yang lebih baik.

b. Pengangguran Struktural

Tidak semua sektor ekonomi dan perusahaan terus berkembang, beberapa mengalami kemunduran. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor seperti kemajuan teknologi mengurangi permintaan barang tersebut dalam bentuk produk baru yang lebih baik. Resesi ini menyebabkan penurunan produksi industri dan beberapa pekerja harus diberhentikan dan menganggur. Pengangguran riil diklasifikasikan sebagai pengangguran structural, yaitu karena struktur kegiatan ekonomi telah berubah. Contohnya: seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya bekerja kini diahli fungsikan sebagai pabrik.

c. Pengangguran Siklikal

Perusahaan akan mengurangi staf atau tutup sebagai akibat dari pengangguran yang disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, yang akan menyebabkan peningkatan pengangguran. Pengangguran semacam ini dikenal sebagai pengangguran siklis. Contohnya: seorang karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran terjadi karena tergantungnya tenaga manusia oleh mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Contohnya: seorang karyawan bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengelas mobil.

2. Jenis-jenis Pengangguran berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini terjadi ketika penambahan kesempatan kerja lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, menyebabkan semakin banyak tenaga kerja dalam yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efeknya adalah mereka tidak bekerja untuk waktu yang lama, ini membuat mereka benar-benar menganggur penuh waktu, oleh karena itu disebut pengangguran terbuka. Ini merupakan indikasi penurunan aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi yang mengurangi input tenaga kerja, atau kegagalan dalam pengembangan industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Sebagian besar pengangguran ini berasal dari sektor jasa dan pertanian. Semua kegiatan ekonomi membutuhkan kerja dan jumlah kerja bergantung pada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika melihat cara kerja perusahaan, mesin dan peralatan yang sedang produksi di negara berkembang, akan sering terlihat ada lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan untuk beroperasi secara efisien dan kelebihan tenaga kerja ini diklasifikasikan sebagai pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Musiman

Situasi pengangguran untuk ini pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di bidang pertanian. Petani tetap menganggur sambil menunggu tanam dan selama jeda antara tanam dan panen.

d. Setengah Menganggur

Orang-orang bergerak cepat dari pedesaan ke kota-kota di negara berkembang, karena itu tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan. Beberapa dipaksa untuk bekerja penuh waktu. Selain itu, ada orang yang bekerja tetapi tidak bekerja penuh dan memiliki jam kerja lebih pendek dari biasanya. Pekerja setengah menganggur adalah mereka yang telah bekerja seperti yang dijelaskan di atas.

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja.

Indeks Pembangunan Manusia

Pengertian bahwa indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan harus dianalisis serta dapat dipahami dan sudut manusia bukan hanya dari pertumbuhan manusianya. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dikutip dari Kementerian Keuangan (2023:1) tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ditetapkan bahwa :

pajak daerah mengacu pada pembayaran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Wahyuningsih (2020: 90) bahwa:

Pajak daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak daerah yang dibebankan oleh peraturan daerah, dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk diatur dan dimanfaatkan.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki dua fungsi, yaitu:

1. sebagai sumber pendapatan daerah (anggaran)
2. sebagai pengukur (regulasi)

Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dikutip dari Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia (2023) disebut bahwa jenis pajak Provinsi terdiri atas,

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan dan
5. Pajak rokok.

dan pajak perbendaharaan/kota dirinci sebagai berikut:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame
5. Pajak lampu Jalan
6. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan
7. Biaya parkir
8. Pajak air dan tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah biaya yang dikenakan untuk layanan atau izin tertentu yang dikeluarkan dan / atau dikeluarkan oleh pemerintah kota, terutama untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. retribusi daerah itu sendiri berasal dari pendapatan daerah.

Menurut Wahyuningsih (2020: 90) berpendapat bahwa: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan secara langsung sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada pembayar”.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dikutip dari Kementrian Keuangan (2023:1) tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan atau dilakukan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan pemerintah daerah, yang dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- a. pelayanan kesehatan
- b. pembersihan dan limbah

- c. penggantian biaya cetak kartu tanda pengenal (KTP) dan ekstrak dari daftar penduduk
- d. layanan Pemakaman dan Kremasi
- e. parkir valet umum di jalan
- f. pelayanan Pemasaran
- g. pelayanan air bersih
- h. pengujian kendaraan bermotor
- i. pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j. penggantian biaya pencetakan peta yang dibuat pemerintah daerah
- k. pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menurut prinsip komersial, baik itu pelayanan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah selama belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain :

- a. penggunaan kekayaan daerah
- b. pasar grosir dan/atau toko
- c. layanan terminal
- d. layanan parkir khusus
- e. layanan tempat penitipan Anak
- f. penginapan/villa
- g. pembuangan kakus
- h. rumah jagal hewan

- i. dermaga kapal
- j. kawasan hiburan dan olah raga
- k. penyebrangan di atas air
- l. pengelolaan air limbah
- m. penjualan usaha produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pembayaran untuk layanan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau bisnis yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan penggunaan tanah, sumber daya alam, atau penggunaan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan lingkungan.

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut dari:

- a. Izin penggunaan tanah/lahan
- b. Izin mendirikan bangunan
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Izin gangguan
- e. Izin trayek
- f. Izin pengambilan hasil hutan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan hasil pengelolaan kekayaan itu sendiri antara lain antara lain.

1. Persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan BUMD atau perusahaan milik daerah.
2. Bagian keuntungan dari penyertaan modal pada pemerintah atau BUMN.
3. Bagian laba atas investasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hal-hal lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Seperti pendapatan transfer, hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan asli daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana yang masuk berasal dari pendapatan asli daerah akan menjadi penunjang guna melaksanakan kewajiban daerah demi mengatur dan meningkatkan perekonomian di tiap-tiap daerah.

Menurut Yovita (2011: 20) berpendapat bahwa:

Dana tersebut merupakan salah satu faktor pendukung untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran rutin daerah dan biaya pembangunan daerah, serta merupakan wahana untuk menginvestasikan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Serta mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pengguna jasa. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari adanya suatu badan yang menanganinya atau yang disertai tugas mengaturnya.

Menurut Wandira, (2013: 29) bahwa:

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan atau difungsikan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana subsidi.

Untuk itu kebijakan dalam mengelola PAD sangat diperlukan untuk kinerja pembangunan di berbagai daerah. Fungsi PAD dalam Kementerian Keuangan tahun (2023:1), sendiri secara sederhana yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah, yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak” (Lumbantoruan dan Hidayat 2014: 16).

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki manfaat penting, diantaranya:

- 1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).**
- 2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.**
- 3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).**

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:

1. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup;
2. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan
3. Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0 – 100. Artinya

semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah dan tertinggal pembangunan wilayah atau negara tersebut dan sebaliknya apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi berarti semakin kuat dan maju pembangunan wilayah atau negara tersebut.

Berdasarkan katagorinya IPM dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut :

1. Tinggi jika IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas jika IPM antara 66,0 – 79,9
2. Menengah Bawah jika IPM antara 50,0 – 65,9
3. Rendah jika IPM kurang dari 50,0

Hubungan Antar Variabel

Hubungan PDRB Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Hasibuan dkk (2022 : 687) bahwa :

Semakin bertambah tinggi PDRB disuatu wilayah, maka semakin besar juga kapasitas sumber keterbukaan wilayah itu. Dalam kenyataannya, PDRB memiliki efek atas keseluruhan angkatan kerja yang masih bekerja menggunakan perkiraan bila nilai PDRB melonjak, maka total nilai tambah hasil pada semua sektor ekonomi disuatu daerah akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan Pengurangan kemiskinan di suatu daerah. Menurut Hadi Sasana dalam Kartika (2022 : 686) “Parameter tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah ialah tingkat produk domestik bruto (PDRB) regional, yang menjadi nilai bersih dari produk serta jasa akhir yang diwujudkan dengan bermacam kegiatan ekonomi disuatu wilayah” .

Hubungan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantar kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuhtetapi mereka sering masih tetap miskin.

Menurut Suripto dan Subail (2020 : 128) bahwa:

Dari tahun ke tahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karna indicator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan.

Hubungan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

United National Development Programme (2017) dalam laporan pembangunan manusia menyatakan antara kemiskinan dan pembangunan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi pertumbuhan mempengaruhi pembangunan manusia melalui rumah tangga (membesarkan anak), pengeluaran rumah tangga

untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (makanan, obat-obatan, buku sekolah), dan pengeluaran pemerintah (prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Pada sisi lainnya, pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas pekerja. Kemiskinan dan indeks pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah, dimana peningkatan indeks pembangunan manusia menurunkan kemiskinan namun di sisi lain peningkatan jumlah penduduk miskin memungkinkan untuk menurunkan indeks pembangunan manusia.

Menurut Hazmi (2019 : 41) bahwa:

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Menurut Ndraha dan Uang (2018: 135) bahwa:

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Menurut Solihin (2006: 129) bahwa,

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Menurut Sukmawati & Naryono (2021: 29) menyatakan bahwa:

Dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat. pemerintah banyak mengandalkan DAU di

karenakan kemampuan keuangannya lemah sehingga DAU digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Nabila (2019 : 26) menunjukkan bahwa :

PDRB atas dasar harga konstan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di provinsi Jawa tengah pada tahun 2010-2019/ Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang telah tersebar diseluruh lapisan masyarakat dan juga disetiap golongan pendapatan masyarakat, sehingga ketika PDRB meningkat maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan

2. Hasil Penelitian Yacoub (2012 : 181) menunjukkan bahwa :

Hasil estimasi pengaruh tingkat pengangguran (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) kabupaten di provinsi Kalimantan Barat signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditentukan sebesar (a) 0,05 atau $0,002 < 0,05$. Koefisien betha sebesar -0,405 yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tidak searah, yaitu apabila tingkat pengangguran meningkat berpotensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya jika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan berpotensi untuk naik, dan pengaruh tersebut signifikan

3. Hasil Penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018 : 231) menunjukkan bahwa:

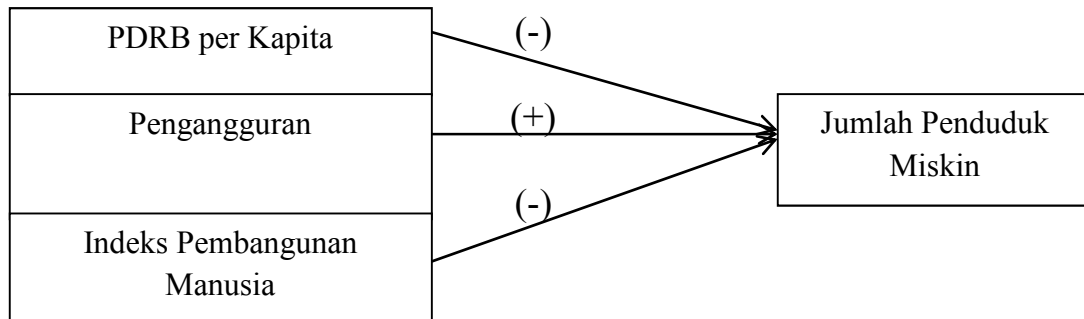
Berdasarkan output pada gambar 3 dan tabel 2, tampak bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71 dengan signifikan $p < 0.001$ dimana urang dari 5% dengan standar error 0.067. Hal ini menunjukkan jika nilai IPM meningkat 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0.71%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Sofilda dkk (2013), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua.

Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada tiga variabel independen, antara lain PDRB perkapita pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. PDRB per kapita adalah nilai total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk, dan tingkat pengangguran digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan indeks pembangunan manusia adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, lalu penggunaan data tersebut akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen akan diregresikan untuk mendapatkan tingkat signifikasinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebabnya bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi dan dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan dan menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Secara skema, kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban awal untuk masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.
2. Pengangguran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.
3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di kabupaten Dairi, dengan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin periode 2011-2021. Kemudian juga untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi 2011-2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi data sekunder dalam bentuk angka yaitu PDRB, Pengguran, IPM dan Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011-2021 yang diambil dalam runtut waktu (*time series*), bersumber dari BPS dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai data-data serta menggabungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Metode Analisis Data

Model yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh PDRB, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021 adalah menggunakan model ekonometrik. Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi.

Model yang digunakan adalah persamaan regresi linear berganda (persamaan regresi sampel) sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i ; 1,2,3,4...,n$$

Dimana:

Y	= Kemiskinan di Kabupaten Dairi (ribuan orang)
$\hat{\beta}0$	= Intersep
$\hat{\beta}1, \hat{\beta}2, \hat{\beta}3, \hat{\beta}4$	= Koefisien regresi (statistik)
X1	= PDRB per kapita (milyar rupiah)
X2	= Pengangguran (orang)
X3	= Indeks Pembangunan Manusia
ϵ_i	= Galat

3.5 Pengujian Hipotesis

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing koefisien dari variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara parsial (uji-t), uji serentak (uji-F) dan koefisien determinasi (R^2).

3.5.1 Uji Individu (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas ditetapkan kriteria hipotesis, yaitu :

1. PDRB (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin

Kabupaten Dairi tahun 2011-2021

$H_1 : \beta_1 > 0$, artinya PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

Rumus untuk mencari : $t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$

$\hat{\beta}_1$: koefisien regresi (statistik)

β_1 : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PDRB per kapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengangguran (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

$H_1 : \beta_2 > 0$, artinya Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

Rumus mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$

$\hat{\beta}_2$: koefisien regresi (statistik)

β_2 : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi. Kemudian

jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi

3. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

$H_1 : \beta_3 < 0$, artinya indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2011-2021.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$

$\hat{\beta}_3$: koefisien regresi (statistik)

β_3 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi . Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya indeks pembangunan manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Dairi

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

3.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel tidak bebas yang dijelaskan variabel bebas secara serentak. Tujuan uji F ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama atau tidak.

Dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menurut hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
 1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 2. $H_1 : \beta_i$ tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah:
$$\frac{JKR (k-1)}{JKG (n-1)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6 Uji Keباikan-Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Widarjono (2013 : 104) menyatakan bahwa :

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai untuk menjelaskan hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keberagaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow 1$, artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran:

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0,1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0,1$ maka dianggap pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinieritasnya serius (tidak dapat ditoleransi). Namun bila sebaliknya nilai matriks

$< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain untuk dapat digunakan mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar dari pada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.7.2 Autokorelasi

Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan dengan lainnya.

Beberapa cara menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji :

3.7.3 Durbin Watson (uji D-W)

“Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi orde satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen”.

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan dU dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diatas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.
3. Angka D-W diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.

Secara umum bisa diambil patokan :

- $0 < d < dL$: Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi positif)
 $0 \leq d \leq dU$: Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)
 $dU < d < 4-dL$: Gagal menolak hipotesis 0 (tidak ada autokorelasi positif/negatif)
 $4-dU \leq d \leq 4-dL$: Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)
 $4 - dL < d < 4$: Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi negatif)
 $4 - dL < d < 4$: Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi negatif)

3.7.4 Uji Run

Untuk mengetahui atau mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan dengan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random.

Gozali (2013 : 108) berpendapat “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak”

Cara yang digunakan dalam uji run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) random (acak)

H_1 : Galat (res_1) tidak random

3.7.5 Normalitas

Teori Gauss Markov:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak.

2. Tidak terjadi autokorelasi

pendapat klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. Variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan uji mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. “kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampe yang kecil” (Gozali, 2013 : 108). Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat. Menurut nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai Z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

Menurut Gozali (2013 : 154) bahwa untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik

nonparametrik Kolmogorov-Sminov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal.

H^1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.8 Definisi Operasional Variabel

1. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum mereka di Kabupaten Dairi yang dinyatakan dalam jumlah orang tahun 2011-2021.
2. PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Dairi yang dinyatakan atas dasar harga tahun 2011-2021.
3. Pengangguran adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di Kabupaten Dairi yang dinyatakan dalam satuan orang tahun 2011-2021.
4. Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar yaitu kesehatan pendidikan dan standar hidup layak di Kabupaten Dairi yang dinyatakan dalam angka mutlak/tahun